KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas, yang merupakan salah satu wujud komitmen organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), perlu menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di Kementerian PPN/ Bappenas. Penyesuaian indikator kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas atas penggunaan anggaran negara.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas SAKIP Kementerian PPN/Bappenas, salah satu rekomendasi adalah perbaikan perencanaan dari aspek kesesuaian perencanaan unit kerja dengan IKU sebagaimana Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/35/M.AA.05/2021 tentang Penilaian SAKIP Kementerian PPN/Bappenas.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, maka perlu penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja

Kementerian PPN/Bappenas, keterlibatan dari seluruh pimpinan dan pegawai yang melakukan penyusunan Laporan Kinerja agar mengacu pada Kebijakan Teknis Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PPN/Bappenas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

   Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas dalam penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) guna penyusunan Laporan Kinerja.

2. Tujuan:

   Surat Edaran ini bertujuan untuk:

   a. mengatur penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.
   b. mengatur kebijakan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
   c. mengatur kebijakan penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/35/M.AA.05/2021 tentang Penilaian SAKIP Kementerian PPN/Bappenas.

D. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini meliputi kebijakan tentang:

1. Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2022.
2. Penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.

E. ISI EDARAN

1. Seluruh unit kerja dalam melakukan penyusunan Laporan Kinerja serta penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 akibat adanya perubahan struktur, tugas dan fungsi, serta mutasi/promosi jabatan agar dapat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian PPN/Bappenas untuk Tahun 2022 disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Edaran ini.
3. Unit Kerja Eselon I dan II menyesuaikan kembali IKU di dalam PK Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Edaran ini.
4. Ketentuan mengenai IKU Tahun 2022 diatur sebagaimana dalam Surat Edaran ini hingga diberlakukannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.

F. PENUTUP

1. Seluruh pejabat dan pegawai di Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TAUFIK HANAFI

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SESMEN PPN/ SESTAMA BAPPENAS
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN PERUBAHAN IKU

1. Unit Kerja Eselon I dan II agar dapat menyesuaikan kembali Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terkait dengan IKU sebagaimana tabel IKU UKE I dan II pada Bab II.
2. IKU yang tercantum di dalam Lampiran II ini bersifat baku dan untuk dijadikan sebagai acuan pelaksanaan dan penilaian kinerja UKE I dan II dalam penyusunan Laporan Kinerja.
3. Untuk IKU yang tidak memiliki target maka tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja pada tahun dimaksud sehingga tidak perlu dilaporkan kinerjanya melalui Laporan Kinerja Unit Kerja.
4. Definisi serta pengukuran atas IKU yang tercantum pada Bab II akan diatur dalam dokumen terpisah.

BAB II PERUBAHAN IKU UKE I DAN II

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputian Bidang Ekonomi:

a. IKU UKE I Kedeputian Bidang Ekonomi

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	Indikator Kinerja Utama dan Deputi Ekonomi	Target UKE I		
					2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1.	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional: a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	85	90	95
	2.	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional: a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%
Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3.	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Ekonomi	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Ekonomi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien	4.	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Ekonomi	90	90.5	91
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan Bidang Ekonomi	90	92	95
			Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional				

b. IKU UKE II Kedeputian Bidang Ekonomi

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
055.01.06	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**						
DEPUTI BIDANG EKONOMI							
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif							**Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang diterima oleh Deputi.	88-91,9 %	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	88-91,9 %	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	91-93,9 %	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diterima oleh Deputi	85-89,9 %	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN							**Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Jasa	-	-	80%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			Keuangan dan BUMN				
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Jasa Keuangan dan BUMN yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
		Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Jasa Keuangan dan BUMN yang diterima oleh Deputi	88-91,9 %	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	88-91,9 %	92-95,9%	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	91-93,9 %	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Jasa Keuangan dan BUMN yang diterima oleh Deputi	85-89,9 %	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter							**Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	81-85%	86-90%	91-95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional		% Rancangan Perpres RKP lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
		Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh Deputi	88-91,9 %	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	88-91,9 %	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	91-93,9 %	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh Deputi	85-89,9 %	90-94,9%	95-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional							**Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang diterima oleh Deputi	88-91,9 %	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	88-91,9 %	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	91-93,9 %	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang diterima oleh Deputi	85-89,9 %	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik							**Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
Analisis Statistik			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Keselarasan KEM Daerah terhadap RKP lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	85%	90%	95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang diterima oleh Deputi	88-91,9	92-95,9	96-100	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	88-91,9	92-95,9	96-100	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	91-93,9 %	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang diterima oleh Deputi	85-89,9 %	90-94,9%	95-100%	

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputian Bidang Pengembangan Regional:

a. IKU UKE I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Deputi Pengembangan Regional	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1.	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional: a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional	85	90	95
	2.	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional: a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang Pengembangan Regional	88-91,9%	92-95,9%	96-100%
Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3.	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh K/L/D dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Pengembangan Regional	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L/D dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Pengembangan Regional	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien	4.	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Pengembangan Regional	90	90.5	91
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan Bidang Pengembangan Regional	90	92	95
			Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional	90%	92%	95%

b. IKU UKE II Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Unit Organisasi Pelaksana
055.01.06	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**						
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL							
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana							**Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	Persentase Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional/ Major Project (PN-MP)	75%	80%	85%	
			Persentase lokasi prioritas dalam profil dan analisis daerah yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen perencanaan (RKP-RPJMN)	75%	80%	85%	
			% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial	81-85%	86-90%	91-95%	
			%Rancangan Perpres RKP lingkup Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembang	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Tata Ruang, Pertanahan,	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	unan nasional		Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial yang diterima oleh Deputi				
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi (Enabler)	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Sistem/Regulasi Perencanaan	% Integrasi Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan bidang Pengembangan Regional	90%	92%	95%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pembangunan Daerah							**Direktorat Pembangunan Daerah**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pembangunan Daerah	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pembangunan Daerah	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pembangunan Daerah	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
		Jangka Pendek (Tahunan)	proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah				
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah	81-85%	86-90%	91-95%	
			%Rancangan Perpres RKP lingkup Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% kesesuaian daerah yang menerima alokasi DAK Fisik Penugasan dalam APBN dengan target lokasi prioritas penerima DAK Fisik Penugasan dalam dokumen Multilateral Meeting DAK Fisik	75%	78%	80%	
			Persentase Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional/ Major Project (PN-MP)	75%	80%	85%	
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Pembangunan Daerah	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi (Enabler)	% Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional I							**Direktorat Regional I**
Perencanaan Pembangunan	Terwujudnya		% keselarasan sasaran program RKP dengan	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
Terkait Lingkup Regional I	integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional		sasaran RPJMN lingkup Regional I				
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Regional I	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Regional I	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Regional I	81-85%	86-90%	91-95%	
			%Rancangan Perpres RKP lingkup Regional I yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% rincian output prioritas K/L di Wilayah Regional I yang selaras dengan kegiatan prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah/ Provinsi dalam koridor pencapaian sasaran PN/MP	75%	80%	85%	
			% Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional/Major Project (PN-MP)	75%	80%	85%	
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Regional I yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup wilayah Regional I	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
			% rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional I dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran utama pembangunan daerah dan sasaran/target prioritas daerah	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya kebijakan pembangunan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L/D	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Unit Organisasi Pelaksana
	nasional yang visioner		dan stakeholders pembangunan lingkup Regional I				
		Kebijakan Inovasi (Enabler)	% Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup Regional I yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional II							**Direktorat Regional II**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional II	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Regional II	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Regional II	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Regional II	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Regional II	81-85%	86-90%	91-95%	
			%Rancangan Perpres RKP lingkup Regional II yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% rincian output prioritas K/L di Wilayah Regional II yang selaras dengan kegiatan prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah/ Provinsi dalam koridor pencapaian sasaran PN/MP	75%	80%	85%	
			% Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional/Major Project (PN-MP)	75%	80%	85%	
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Regional II yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup wilayah Regional II	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			% rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional II dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran utama pembangunan daerah dan sasaran/ target prioritas daerah	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup Regional II	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi (Enabler)	% Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup Regional II yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional III							**Direktorat Regional III**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional III	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Regional III	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Regional III	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Regional III	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Regional III	81-85%	86-90%	91-95%	
			%Rancangan Perpres RKP lingkup Regional III yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% rincian output prioritas K/L di Wilayah Regional III yang selaras dengan kegiatan prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah/Provinsi dalam koridor pencapaian sasaran PN/MP	75%	80%	85%	
			% Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional/Major Project (PN-MP)	75%	80%	85%	
	Terwujudnya	Informasi Hasil Pelaksanaan	% Ketersediaan informasi hasil	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Rencana Pembangunan	pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Regional III yang diterima oleh Deputi				
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup wilayah Regional III	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
			% rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional III dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran utama pembangunan daerah dan sasaran/target prioritas daerah	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup Regional III	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi (Enabler)	% Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup Regional III yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan:

a. IKU UKE I Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1.	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional: a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	85	90	95
	2.	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional: a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%
Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3.	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien	4.	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	90	90.5	91
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia,	90	92	95

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
				Masyarakat, dan Kebudayaan			
			Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional				

b. IKU UKE II Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
055.01.06	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**						
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT, DAN KEBUDAYAAN							
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan							**Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	T erwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100 %	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	88-91,9%	92-95,9%	96-100 %	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	91-93,9%	94-96,9%	97-100 %	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100 %	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi dan Iptek							**Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang	81-85%	86-90%	91-95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			dalam RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	T erwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100 %	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	88-91,9%	92-95,9%	96-100 %	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	91-93,9%	94-96,9%	97-100 %	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100 %	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga							**Direktorat Keluarga,**

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	85%	90%	95%	**Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga**
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	T erwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100 %	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	88-91,9%	92-95,9%	96-100 %	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders	91-93,9%	94-96,9%	97-100 %	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			pembangunan lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga				
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100 %	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat							**Direkotrat Kesehatan dan Gizi Masyarakat**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Terwujudnya lntegrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	T erwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100 %	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	88-91,9%	92-95,9%	96-100 %	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	91-93,9%	94-96,9%	97-100 %	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100 %	

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan:

a. IKU UKE I Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1.	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional: a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan			
	2.	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional: a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%
Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3.	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien	4.	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	90	90.5	91
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	90	92	95
			Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional				

b. IKU UKE II Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
055.01.06	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**						
DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN							
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi							**Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat							
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan *Masyarakat*	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi *Perencanaan* Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan *Jangka Menengah*	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan *Masyarakat*	85%	90%	95%	**Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat**
			% keselarasan sasaran program *Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup*	-	-	*80%*	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat				
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Penanggulangan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat				
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial							**Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Perencanaan Kependudukan dan Jaminan Sosial yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Ketenagakerjaan							**Direktorat Ketenagakerjaan**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Ketenagakerjaan	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Ketenagakerjaan	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Ketenagakerjaan	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Ketenagakerjaan	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Ketenagakerjaan	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Ketenagakerjaan yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Ketenagakerjaan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			yang diterima oleh Deputi				
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Ketenagakerjaan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Ketenagakerjaan	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Ketenagakerjaan yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam:

   a. IKU UKE I Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1.	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional: a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam			
	2.	SS-2: Terwujudnya	Persentase Kinerja Pengendalian	Persentase Kinerja Pengendalian	88-91,9%	92-95,9%	96-100%

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
		efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Pembangunan Nasional: a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam			
Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3.	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien	4.	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	90	90.5	91
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	90	92	95
			Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional				

b. IKU UKE II Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
055.01.06	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**						
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM							
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air							**Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Perencanaan Pembangunan Nasional		% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air yang diterima oleh Deputi	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	91-93,9 %	94-96,9 %	97-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air yang diterima oleh Deputi	85-89,9 %	90-94,9 %	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan							**Direktorat Kelautan dan Perikanan**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Kelautan dan Perikanan	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Kelautan dan Perikanan	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Kelautan dan Perikanan	91-93,9 %	94-96,9 %	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi	85-89,9 %	90-94,9 %	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan							**Direktorat Kelautan dan Perikanan/ICCTF**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan		04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup							**Direktorat Lingkungan Hidup**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Lingkungan Hidup	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Lingkungan Hidup	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Lingkungan Hidup	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Lingkungan Hidup	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Lingkungan Hidup yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Lingkungan Hidup yang diterima oleh Deputi	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkungan Hidup	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Lingkungan Hidup	91-93,9 %	94-96,9 %	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Lingkungan Hidup yang diterima oleh Deputi	85-89,9 %	90-94,9 %	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian							
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pangan dan Pertanian	85%	90%	95%	**Direktorat Pangan dan Pertanian**
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pangan dan Pertanian	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pangan dan Pertanian	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pangan dan Pertanian	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Pangan dan Pertanian yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pangan dan Pertanian yang diterima oleh Deputi	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pangan dan Pertanian	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	
	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Pangan dan Pertanian	91-93,9 %	94-96,9 %	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Pangan dan Pertanian yang diterima oleh Deputi	85-89,9 %	90-94,9 %	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan							**Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana:

a. IKU UKE I Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Deputi Sarana dan Prasarana	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1.	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional: a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana			
	2.	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional: a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	88-91,9%	92-95,9%	96-100%
Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3.	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien	4.	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Sarana dan Prasarana	90	90.5	91
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana	90	92	95
			Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional				

b. IKU UKE II Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
055.01.06	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL						
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika							**Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika	91-93,9 %	94-96,9 %	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika yang diterima oleh Deputi	85-89,9 %	90-94,9 %	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Air							**Direktorat Sumber Daya Air**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya Air	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya Air	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Sumber Daya Air	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Sumber Daya Air	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Sumber Daya Air yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Sumber Daya Air	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Sumber Daya Air	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Sumber Daya Air	91-93,9 %	94-96,9 %	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Sumber Daya Air yang diterima oleh Deputi	85-89,9 %	90-94,9 %	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman							**Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perumahan dan Permukiman	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangu	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	nan Nasional	Kebijakan Percepatan Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman	91-93,9 %	94-96,9 %	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterima oleh Deputi	85-89,9 %	90-94,9 %	95-100%	
Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional							**Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional**
Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% proyek Infrastruktur Nasional dalam dokumen Renja K/L dan RKA K/L	85%	90%	95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% lokasi prioritas yang diakomodir dalam koridor PN/MP sesuai dengan analisis wilayah/provinsi sesuai dengan arahan regional	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup erencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	91-93,9 %	94-96,9 %	97-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi							**Direktorat Transportasi**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Transportasi	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Transportasi	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Transportasi	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Transportasi	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Transportasi yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangu	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Transportasi	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	nan Nasional	Kebijakan Percepatan Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Transportasi	88-91,9 %	92-95,9 %	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Transportasi	91-93,9 %	94-96,9 %	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Transportasi yang diterima oleh Deputi	85-89,9 %	90-94,9 %	95-100%	

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan:

   a. IKU UKE I Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1.	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional: a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan			
	2.	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional: a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%
Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif	3.	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders*	91-93,9%	94-96,9%	97-100%

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
dan berkelanjutan			*Stakeholders* Pembangunan	Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan			
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien	4.	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	90	90.5	91
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	90	92	95
			Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional				

b. IKU UKE II Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
055.01.06	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**						
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN							
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi							**Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup	-	-	80%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi				
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi							**Direktorat Hukum dan Regulasi**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Hukum dan Regulasi	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Hukum dan Regulasi	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			sektor/bidang dalam RKP lingkup Hukum dan Regulasi				
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Hukum dan Regulasi	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Hukum dan Regulasi yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Hukum dan Regulasi yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Hukum dan Regulasi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Hukum dan Regulasi	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Hukum dan Regulasi yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan							**Direktorat Pertahanan dan Keamanan**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pertahanan dan Keamanan	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pertahanan dan Keamanan	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pertahanan dan Keamanan yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Pertahanan dan Keamanan	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Pertahanan dan Keamanan yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi							**Direktorat Politik dan Komunikasi**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi	Rencana Pembangunan	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
Politik dan Komunikasi	Perencanaan Pembangunan Nasional	Jangka Menengah	lingkup Politik dan Komunikasi				
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Politik dan Komunikasi	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Politik dan Komunikasi yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Politik dan Komunikasi yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Politik dan Komunikasi	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Politik dan Komunikasi yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional							**Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional**
Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			dalam RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional				
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*	-	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional				
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	

8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan:

a. IKU UKE I Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Deputi Pendanaan Pembangunan	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1.	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional: a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan			
	2.	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional: a. Persentase Kinerja	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Deputi Pendanaan Pembangunan	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
		pembangunan nasional	Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Bidang Pendanaan Pembangunan			
Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3.	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien	4.	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Pendanaan Pembangunan	90	90.5	91
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan Bidang Pendanaan Pembangunan	90	92	95
			Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	90%	92%	95%

b. IKU UKE II Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
055.01.06	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**						
DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN							
Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan							**Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan**
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Alokasi Pendanaan	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan alokasi pendanaan pada RKP dengan RPJMN yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
Pembangunan		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Alokasi bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terintegrasi dengan prioritas RKP yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% Keselarasan muatan prioritas RKP dengan RKA K/L lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% Proyek prioritas yang terdeteksi lokasinya (untuk proyek prioritas yang bersifat kewilayahan)	85%	90%	95%	
			% Penyelesaian Pagu Indikatif dan lampiran SB Pagu Indikatif dalam rangka RAPBN yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% Penyelesaian Pagu Anggaran dan lampiran SB Pagu Anggaran dalam rangka RAPBN yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% Rancangan Perpres RKP lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan				
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
	Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan didukung oleh Kapabilitas SDM	Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah sistem perencanaan pendanaan pembangunan yang terintegrasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	
Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Bilateral							
Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pendanaan Bilateral	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan bidang pada project pipeline pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan dengan priotitas dan/atau dengan major project RPJMN	85%	90%	95%	**Direktorat Pendanaan Bilateral**
			% Keselarasan sasaran program Renstra K/L mitra kerja dengan sasaran RPJMN	-	-	90%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			penyusunan Pagu Indikatif				
			% keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan sasaran Renstra K/L mitra kerja	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan RKA mitra kerja	85%	90%	95%	
			% Daftar kegiatan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk proses Loan Agreement dalam rangka pembiayaan RKP	85%	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pendanaan bilateral dan kredit ekspor terhadap proyek-proyek on-going	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
			% ketersediaan hasil analisis terhadap pemantauan lapangan dan evaluasi proyek-proyek pendanaan bilateral dan kredit ekspor	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% rekomendasi pengendalian dan pelancaran rencana kegiatan pendanaan bilateral yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Inovasi Pembangunan	% rekomendasi hasil telaah/analisis pendanaan bilateral dan kredit ekspor	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			yang diterima oleh Deputi				
			% prakarsa pengembangan pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima dan didukung oleh stakeholders terkait	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
			% tercapainya target penyiapan Program Compact II terhadap rencana kerja tahunan	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Multilateral							
Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pendanaan Multilateral	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pendanaan Multilateral	85%	90%	95%	**Direktorat Pendanaan Multilateral**
			% Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pendanaan Multilateral	-	-	80%	
			% Keselarasan kebijakan dan program yang ada di CPS Mitra Pembangunan Multilateral dengan sasaran RPJMN dan Renstra	85%	90%	95%	
			% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pendanaan Multilateral	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pendanaan Multilateral	81-85%	86-90%	91-95%	
			% Keselarasan rencana proyek pinjaman multilateral dalam RKP periode berikutnya dengan rencana proyek pinjaman multilateral dalam Green Book	85%	90%	95%	
			% Keselarasan Daftar Kegiatan dengan rencana proyek pinjaman multilateral dalam Green Book	85%	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri multilateral	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
			Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pendanaan Multilateral	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi intervensi pendanaan multilateral	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			yang dibahas dalam forum kerjasama internasional				
			% Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional/**Major Project** yang dijalankan K/L lingkup Pendanaan Multilateral	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
			% Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pendanaan Multilateral yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan							**Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan**
Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan muatan dokumen Rencana Proyek KPBU dengan RPJMN	85%	90%	95%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% Rancangan Perpres RKP lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pengembangan pendanaan pembangunan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi				
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan							**Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan**
Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan Dokumen Perencanaan jangka menengah Pendanaan Dalam Negeri dengan RPJMN yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% keselarasan Dokumen Perencanaan jangka menengah Pendanaan Luar Negeri dengan RPJMN yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% Keselarasan kegiatan dalam DKPPDN dengan DKDPDN dan RKP yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
			% Keselarasan kegiatan dalam DRPPLN dengan DRPLN-JM dan RKP yang	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			diterima oleh Deputi				
			% Keselarasan kegiatan dalam DPP-SBSN dengan RPJMN, Renstra K/L dan RKP yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas dan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan	91-93,9%	94,96,9%	97-100%	
			% Rekomendasi kebijakan strategi pendanaan pembangunan yang diterima oleh Deputi	91-93,9%	94,96,9%	97-100%	
			% Rekomendasi inovasi pendanaan pembangunan yang diterima oleh Deputi	91-93,9%	94,96,9%	97-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
		Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	

9. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan:

   a. IKU UKE I Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1.	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional: a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan			
	2.	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional: a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%
Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3.	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi	Persentase Rekomendasi	85-89,9%	90-94,9%	95-100%

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
			Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan			
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien	4.	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	90	90.5	91
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	90	92	95
			Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	90%	92%	95%

b. IKU UKE II Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
055.01.06	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**						
DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN							**Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah**
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah							
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	85%	90%	95%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	-	-	80%	
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	81-85%	86-90%	91-95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			n Daerah yang diterima oleh Deputi				
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan yang dikoordinasikan dengan K/L mitra dan Pemerintah Daerah	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh stakeholders pembangunan lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	91-93,9%	94,96,9%	97-100%	
DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN							**Direktorat Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan Sektoral**
Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan Sektoral							
Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L	-	-	80%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral				
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	81-85%	86-90%	91-95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
			-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral dalam rangka pencapaian pembangunan sektoral yang dikoordinasikan dengan K/L	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	91-93,9%	94,96,9%	97-100%	
DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN							**Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan**
Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan							
Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	85%	90%	95%	
			% keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan	-	-	80%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			Pengendalian Pembangunan				
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	% keselarasan target output prioritas Renja K/L dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	85%	90%	95%	
			% keselarasan anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	81-85%	86-90%	91-95%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Pelaksanaan sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
		Sistem/Regulasi Pengendalian	% Pengembangan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional/**Major Project** yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
	Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan didukung oleh Kapabilitas SDM	Sistem Informasi Pemerintahan	% Penyusunan rekomendasi strategi Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan yang diterima oleh Deputi	85%	90%	95%	
DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN							**Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan**
Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan							
		Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	Jumlah pedoman penyusunan rencana yang diacu oleh stakeholders perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			% Penyelesaian Dokumen Rancangan RKP yang diterima oleh Deputi	100%	100%	100%	
			% Penyelesaian Dokumen RKP yang diterima oleh Deputi	100%	100%	100%	
			% Penyelesaian Dokumen Pemutakhiran RKP yang diterima Deputi	100%	100%	100%	
	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Hasil informasi pengendalian perencanaan pembangunan nasional yang diterima oleh Deputi	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	
			Penyelesaian Rancangan Lampiran Pidato Presiden RI atas pelaksanaan rencana pembangunan yang diterima Deputi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi pengendalian perencanaan pembangunan nasional yang diterima sektor	88-91,9%	92-95,9%	96-100%	

10. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas:

    a. IKU UKE I Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan	1.	SS-1: Terwujudnya integrasi,	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional: a. Integrasi Perencanaan	Persentase Perencana yang	90%	92.5%	95%

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia		sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Memenuhi Standar Kompetensi			
	2.	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional: a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah				
Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3.	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan atas Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh Unit Kerja Eselon I dan II	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencanaan Pembangunan	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien	4.	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	90	90.5	91
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan	90	92	95
			Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	Persentase Dukungan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	90%	92%	95%

b. IKU UKE II Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
055.01.01	**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAPPENAS**						
SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS							
Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan							**Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan**
Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan /Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Layanan Kehumasan dan Protokoler	Nilai keterbukaan informasi publik	81	82	83	
			Nilai Pengawasan Kearsipan	75	80	85	
			Indeks kepuasan atas layanan kehumasan, informasi publik, keprotokolan, persidangan, ketatausahaan pimpinan, dan perpustakaan	90	92	94	
Pembinaan dan Pelayanan Hukum							**Biro Hukum**
Pembinaan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	- Layanan Hukum	% penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum	100%	100%	100%	
		- Layanan Bantuan Hukum	% pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum	100%	100%	100%	
		- Layanan Hukum - Layanan Bantuan Hukum	Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum	90	92	94	
Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian							**Biro Sumber Daya Manusia**
Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	- Diklat Struktural - Diklat Fungsional	% kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia yang tersusun	100%	100%	100 %	
			Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PPN/Bappenas	76	76	77	
		- Layanan Pengelolaan SDM - Layanan Pengembangan Pegawai	Indeks Kepuasan Layanan Biro SDM	90	92	94	
Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Rencana Kerja dan Anggaran	% Penyelesaian Rencana Strategis, Renja K/L dan RKA K/L Kementerian PPN/ Bappenas yang diterima oleh Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	96%	98%	100%	**Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana**
		Layanan Manajemen Organisasi	% penerapan program RB di Kementerian PPN/Bappenas dan UKE	96%	98%	100%	
			% penyelesaian penataan organisasi dan tata laksana yang diterima Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	96%	98%	100%	
		Laporan Pemantauan dan Evaluasi	% akurasi realisasi penyerapan anggaran Kementerian PPN/ Bappenas	96%	98%	100%	
			% capaian kinerja dan akuntabilitas Kementerian PPN/ Bappenas	96%	98%	100%	
		Dokumen Kerjasama	% penyelesaian fasilitasi pengembangan kerjasama untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan	96%	98%	100%	
			% koordinasi penyusunan program PHLN di Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%	
			Pendapat stakeholder terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan	Baik	Baik	Baik	
		Layanan Dukungan Perencanaan Pembangunan	Indeks kepuasan layanan perencanaan,	90	92	94	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			organisasi, dan tata laksana				
Pelayanan Umum dan Keuangan							**Biro Umum**
Pelayanan Umum dan Keuangan	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	- Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Laporan Keuangan - Dokumen Perbendaharaan - Layanan Administrasi Satker	% Akurasi pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara	100%	100%	100%	
			% Usulan pembayaran yang dilayani sesuai prosedur	100%	100%	100%	
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional							**Biro Umum**
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Layanan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/ Bappenas sesuai rencana	96%	98%	100%	
		- Layanan Pengelolaan BMN - Layanan Rumah Tangga	Indeks kepuasan pengguna layanan umum, dan pengelolaan BMN	90	92	94	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadaan dan layanan internal	90	92	94	
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan							**Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana**
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Jabatan Fungsional Perencana yang lulus uji kompetensi	70%	75%	80%	
			Persentase karyasiswa yang lulus pendidikan	75%	80%	85%	
			Persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan	92%	94%	96%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan	Percentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi / Unit Kerja Perencanaan Pembangunan	85-89,9%	90-94,9%	95-100%	
	Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan didukung oleh Kapabilitas SDM	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	80	85	90	
		Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Indeks kepuasan atas layanan pembinaan jabatan fungsional perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	90	92	94	
Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional							**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan**
Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	% pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi	90%	90%	90%	
			Penerapan indeks SPBE Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Baik	Baik	
		Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	% sistem informasi yang berfungsi	90%	90%	90%	
			% pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan	90%	90%	90%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
			% pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan	90%	90%	90%	
Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan							**Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja**
Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	- Penyusunan Analisis Kebijakan - Analisis Kinerja	% Rekomendasi Hasil Analisis dan Harmonisasi Kebijakan dalam rangka Perumusan Penyelesaian Isu Strategis Nasional/Major Project yang akan dijalankan oleh Unit Kerja Eselon I dan II	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
	Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan didukung oleh Kapabilitas SDM	Pengelolaan dan Pemantauan Evaluasi Kebijakan Menteri	Indeks kepuasan koordinasi dalam penyiapan bahan Menteri terkait pengelolaan kebijakan, analisis kebijakan, dan analisis kinerja	90	92	94	

11. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Utama:

a. IKU UKE I Inspektorat Utama

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Inspektorat Utama	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1.	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional: a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah				
	2.	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional: a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat				

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Inspektorat Utama	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
			b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah				
Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3.	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan				
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan				
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien	4.	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	1. Tingkat Persepsi *Stakeholders* Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas			
				2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas			
				3. Tingkat Maturitas SPIP Kementerian PPN/Bappenas			
				4. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Kementerian PPN/Bappenas			
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional				
			Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional				

b. IKU UKE II Inspektorat Utama

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
055.01.01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAPPENAS						
INSPEKTORAT UTAMA							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum							**Inspektorat Bidang Administrasi Umum**
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Terlaksananya Pelayanan Pembinaan dan Keuangan	Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan pengawasan intern	Baik	Baik	Baik	
		Terlaksananya Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan	% Pelaksanaan Pendampingan Eksternal	100%	100%	100%	
		Terlaksananya Pelaksanaan Audit Internal	% Rekomendasi Pengawasan Intern bidang administrasi umum	100%	100%	100%	
		Pembinaan Pengawasan Keuangan	% Rekomendasi Hasil Validasi/self assessment penilaian maturitas SPIP yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	100%	100%	
		Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal	% penerapan area of improvement (AOI) IACM	100%	100%	100%	
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan							**Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan**
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Kinerja	Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan pengawasan intern	Baik	Baik	Baik	
		Terlaksananya Tindak Laniut Laporan Hasil Pengawasan	% Pelaksanaan Pendampingan Eksternal	100%	100%	100%	
		Terlaksananya Pelaksanaan Audit Internal	% Rekomendasi Pengawasan Intern bidang kinerja kelembagaan	100%	100%	100%	
		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal	% rekomendasi hasil validasi SPIP atas sub unsur yang terkait dengan reformasi birokrasi yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	100%	100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator UKE II (Hasil Pembahasan)	Target			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	
		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal	% Penyelesaian Self Assessment/Validasi IACM	100%	100%	100%	

12. Indikator Kinerja Utama (IKU) Staf Ahli:

a. IKU UKE I Staf Ahli

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Staf Ahli	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1.	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional: a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah				
	2.	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional: a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah				
Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3.	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional lingkup (Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan; Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; Hubungan Kelembagaan; Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur; Pemerataan dan Kewilayahan) yang diterima menjadi Kebijakan Menteri	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan lingkup (Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan; Sosial	85-89,9%	90-94,9%	95-100%

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Kementerian	IKU Staf Ahli	Target IKU UKE I		
					2022	2023	2024
				dan Penanggulangan Kemiskinan; Hubungan Kelembagaan; Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur; Pemerataan dan Kewilayahan) yang diterima menjadi Kebijakan Menteri			
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien	4.	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas				
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional				
			Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional				

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TAUFIK HANAFI